



LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN
(LPPK)
AKHIR TAHUN ANGGARAN
LURAH HARGOREJO
TAHUN 2025

DISAMPAIKAN KEPADA
BUPATI KULON PROGO
MELALUI
PANEWU KOKAP

PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN LURAH HARGOREJO TAHUN 2025

BAB. I PENDAHULUAN

A. Pengantar.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 huruf e disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir anggaran secara vertikal kepada Bupati/ Walikota.

Bersama ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan serta dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka Lurah Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun dan melaporkan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Kulon Progo melalui Panewu Kokap sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan kalurahan berdasarkan kewenangan kalurahan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan baik pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan atasan sudah kami laksanakan dengan semaksimal mungkin, demikian pula dalam bidang pembangunan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah

atasan dan warga masyarakat, itu semua berkat kerjasama Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Kelembagaan dan Masyarakat.

Pelaksanaan tugas yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Kalurahan adalah sebagai pemerintah terendah dan sebagai ujung tombak, maka kedudukan Pemerintah Kalurahan perlu diperkuat. Oleh sebab itu senantiasa diperlukan bimbingan, sehingga Pemerintah Kalurahan dapat memacu berhasilnya program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat maupun penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Dengan ini kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat ditelaah bersama, seberapa jauh gerak kemajuan Kalurahan Hargorejo dan memperoleh solusi untuk dapat mengatasi kesulitan maupun hambatan yang timbul dari tahun ke tahun.

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan

- Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Kalurahan;
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan;
 21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
 23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
31. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
32. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027;
33. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Hari Jadi Kalurahan Hargorejo;
34. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2024;
35. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun

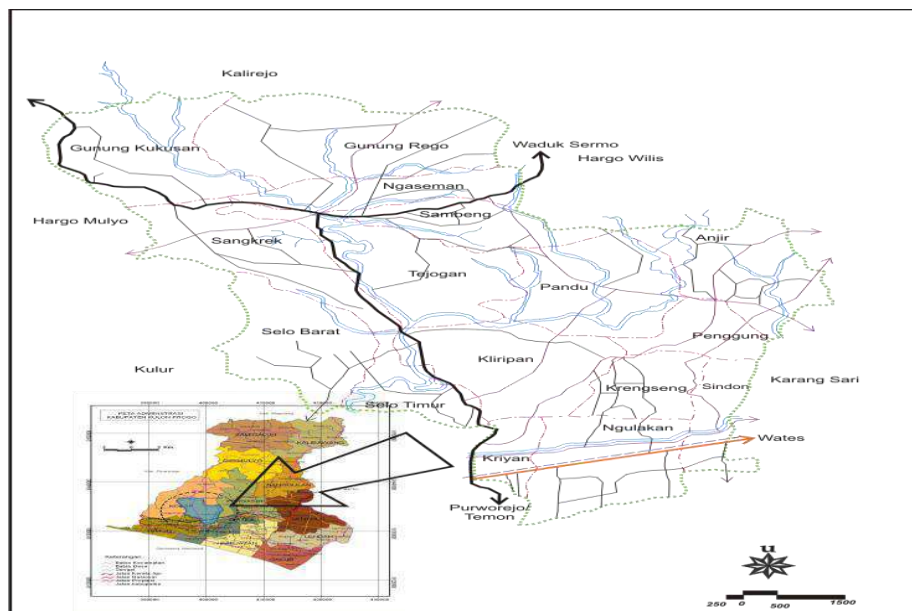
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

36. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Kalurahan untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo Tahun Anggaran 2025;
38. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo;
39. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; dan
40. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

B. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis

Peta Kalurahan Hargorejo



Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kalurahan dari 87 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat.

Batas Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Timur : Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih

Barat : Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap dan Kalurahan Kulur, Kapanewon Temon

Utara : Kalurahan Hargowilis dan Kalirejo, Kapanewon Kokap

Selatan : Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih

Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 500 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :

a. Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 251 - 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sambeng, Pandu, Tejogan dan Padukuhan Sangkrek. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

b. Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 51 - 250 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan Selo Timur, Selo Barat, Anjir, Penggung dan Kliripan, wilayah dengan lereng antara 2 - 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Bagian Selatan

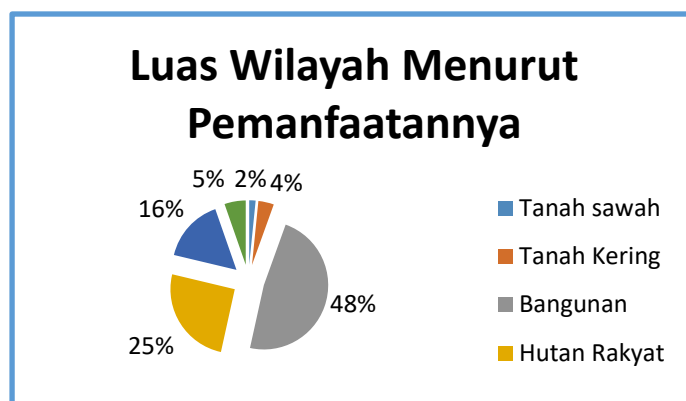
Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 50 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan Kriyan, Krengseng, Ngulakan dan Padukuhan Sindon.

Luas wilayah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo adalah 1.543,45 hektar. Secara administratif terbagi menjadi 16 Padukuhan yang terdiri dari :

1. Padukuhan Gunung Kukusan;
2. Padukuhan Gunung Rego;
3. Padukuhan Ngaseman;
4. Padukuhan Sambeng;
5. Padukuhan Sangkrek;
6. Padukuhan Tejogan;
7. Padukuhan Selo Barat;
8. Padukuhan Selo Timur;
9. Padukuhan Kliripan;
10. Padukuhan Penggung
11. Padukuhan Pandu;
12. Padukuhan Anjir;
13. Padukuhan Krengseng;
14. Padukuhan Sindon;
15. Padukuhan Ngulakan; dan
16. Padukuhan Kriyan.

Penggunaan tanah di Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, meliputi:

- 1) Tanah sawah : 24,64 Ha
- 2) Tanah kering : 60,32 Ha
- 3) Bangunan : 740,16 Ha
- 4) Hutan Rakyat : 390,00 Ha
- 5) Hutan Negara : 245,86 Ha
- 6) Lainnya : 82,47 Ha



Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2025
(prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Pemanfaatan Tanah Kalurahan mendasar pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo, Tanah Kalurahan seluas kurang lebih 435.823 m², dengan rincian:

- 1) Tanah Kas Desa : 166.066 m²
- 2) Tanah Pelungguh : 248.538 m²
- 3) Tanah Pengarem-arem : 21.219 m²

Tanah Kalurahan yang dilepaskan seluas kurang lebih 400 m²

(sumber dari lampiran Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo)

Tanah lain yang dikelola Pemerintah Kalurahan yaitu Tanah Sultan Ground (SG)

Yaitu sejumlah : 254,4108 Ha

Yang pemanfaatannya untuk :

- 1) Masyarakat : 2,38 Ha
- 2) Kalurahan : 0,99 Ha
- 3) Gereja : 0,37 Ha
- 4) Kuburan : 3,77 Ha
- 5) Kantor SKPD : 0,3 Ha
- 6) Pasar Kalurahan : 0,19 Ha
- 7) Hutan Negara : 243, 89 Ha
- 8) Kebun Buah Kalurahan : 2,03 Ha
- 9) Lapangan Kalurahan : 0,49 Ha
- 10) Gedung Balai Padukuhan : 0,13 Ha

2. Gambaran Umum Demografis.

Adapun Jumlah Penduduk Kalurahan Hargorejo di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk	Jiwa	KK
Laki-laki	4.720	2.776
Perempuan	4.839	732
Total	9.559	3.498

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2025

(prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Jenis Pendidikan/ Jenis Kelamin	L	P	Jumlah
Belum sekolah	754	816	1.570
Belum tamat SD	397	404	801
Tamat SD	888	1.071	1.959
Tamat SLTP	919	955	1.874

Tamat SLTA	1.552	1.290	2.842
D1/ D2	27	26	53
D3	46	68	114
S1	128	203	331
S2	8	6	14
S3	1	0	1
JUMLAH	4.720	4.839	9.559

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2025

(prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

3. Kondisi Ekonomi

Di lereng Perbukitan Menoreh yang hijau dan tenang, Kalurahan Hargorejo menapaki tahun 2025 dengan wajah baru. Bukan lagi sekadar Kalurahan penghasil nira kelapa, Hargorejo kini menjelma menjadi simbol kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal dan kebijakan nasional yang berpihak.

Program Reforma Agraria yang digulirkan pemerintah pusat menjadi titik balik bagi masyarakat Hargorejo. Tak hanya memberikan legalitas atas tanah yang selama ini digarap, program ini juga membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi. Melalui pendampingan intensif, petani yang dulunya hanya menjual nira mentah kini mampu mengolahnya menjadi gula semut berkualitas ekspor.

Produk gula semut Hargorejo, yang semula hanya beredar di pasar lokal, kini telah menembus pasar nasional bahkan internasional. Dengan kemasan yang menarik dan standar mutu yang terjaga, gula semut ini menjadi primadona baru dari Kulon Progo. Pendapatan petani meningkat, dan semangat kolektif tumbuh seiring dengan terbentuknya koperasi dan kelompok usaha bersama.

Di balik keberhasilan itu, kearifan lokal tetap menjadi ruh yang menghidupkan. Tradisi gotong royong dalam proses produksi, mulai dari penyadapan nira hingga pengemasan, tetap dijaga. Sistem “sambatan” antar warga dalam panen dan produksi menjadi bentuk solidaritas yang memperkuat ketahanan sosial.

Selain itu, warga memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman obat dan pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada pasar luar. Ibu-ibu PKK dan KWT juga aktif dalam pelatihan pengolahan pangan berbasis kelapa, menciptakan diversifikasi produk seperti permen gula semut dan minuman herbal.

Keberhasilan Hargorejo bukan hasil kerja satu pihak. Ini adalah buah dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya, dan masyarakat desa. Pemerintah menyediakan kebijakan dan pendampingan, sementara masyarakat menjaga semangat dan nilai-nilai lokal. BUMDes menjadi penghubung antara potensi desa dan pasar, mengelola produksi, distribusi, hingga promosi digital.

Tahun 2025 menjadi saksi bahwa desa seperti Hargorejo mampu berdiri tegak di tengah tantangan zaman. Dengan tanah yang kini sah dimiliki, dengan produk yang kini dikenal dunia, dan dengan semangat kolektif yang tak lekang oleh waktu, Hargorejo membuktikan bahwa masa depan bisa tumbuh dari akar yang kuat dan rasanya manis, seperti gula semut yang dihasilkan.

Perekonomian Hargorejo juga didukung oleh potensi dasar seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan dan sector pertambangan. Hasil alam dan kreatifitas manusia menjadi modal awal bagi perkembangan perekonomian penduduk. Hal ini dapat dilihat pada kawasan ekonomi di Hargorejo yang menjadi andalan masyarakat, yaitu kawasan produksi gula kelapa di Padukuhan Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sambeng, Tejogan, Sangkrek, Penggung, Anjir; kawasan produksi batubata dan genteng di Padukuhan Selo Barat dan Selo Timur; kawasan pertanian sawah

di Padukuhan Ngulakan, Sindon, dan Kriyan; kawasan pemanfaatan hasil hutan di Selo Timur, Kliripan, dan Pandu; kawasan potensi eduwisata eks tambang mangan di Kliripan, Anjir, Penggung dan Kriyan; kawasan terdampak pertambangan di Padukuhan Gunung Kukusan, Gunung Rego, dan Ngaseman; kawasan ekonomi kreatif di Penggung dan Kriyan.

BUMDesa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo

Perkembangan BUMDesa tahun 2025 sangat erat kaitannya dengan program ketahanan pangan, didorong oleh Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025 yang mengamankan alokasi minimal 20% Dana Desa (DD) untuk sektor ini, menjadikan BUMDesa sebagai motor penggerak melalui penyertaan modal untuk usaha produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, dengan tujuan membangun kemandirian pangan, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung program gizi nasional.

BUMDesa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo yang semula fokus pada unit simpan pinjam (keuangan mikro), mulai bertransformasi sejak Pemerintah Pusat meluncurkan Program Ketahanan Pangan. Dengan dukungan Dana Desa dan pendampingan teknis, BUMDesa membentuk unit baru yaitu Ketahanan Pangan (Ketapang) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Unit ketapang bergerak di bidang peternakan yaitu program anggaduh kambing dan budidaya ayam Jowo Super (Joper). Program ini tidak berjalan sendiri namun didukung oleh masyarakat sebagai penggaduh kambing. Antusiasme masyarakat cukup kuat dengan dibuktikan penggaduh berjumlah lebih dari 100 orang dan kambing yang digaduhkan lebih dari 100 ekor.

Adapun unit PBJ juga menjawab tantangan system keuangan kalurahan dimana penyedia barang/jasa sesuai aturan perpajakan harus Perusahaan Kena Pajak (PKP). Bumdesa juga melibatkan masyarakat sebagai penyedia utama/ produsen sehingga dalam hal ini Bumdesa adalah bendera/platform yang digunakan masyarakat dalam pemasaran produknya.

Dampak dari program ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan melalui bagi hasil BUMDesa. Sehingga BUMDesa tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan solidaritas Kalurahan Hargorejo.

Koperasi Desa Merah Putih

Di tengah geliat ekonomi desa yang kian dinamis, Kalurahan Hargorejo melangkah mantap dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada pertengahan tahun 2025. Lahir dari semangat gotong royong dan dorongan kebijakan nasional, koperasi ini menjadi jawaban atas tantangan ekonomi lokal yang semakin kompetitif.

Pembentukan KDMP Kalurahan Hargorejo dimulai melalui musyawarah kalurahan khusus (Muskalsus) yang melibatkan pamong kalurahan, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelembagaan lokal. Dalam forum ini, warga menyepakati pentingnya memiliki lembaga ekonomi yang benar-benar berpihak pada kepentingan bersama, bukan sekadar mengejar keuntungan.

Dengan struktur kepengurusan yang dipilih secara demokratis, KDMP mengusung prinsip inklusivitas: setiap warga desa berhak menjadi anggota, menyuarakan pendapat, dan menikmati manfaatnya. Ini menjadi pembeda utama dibanding lembaga keuangan lain yang cenderung eksklusif dan berorientasi profit.

Hadirnya KDMP tidak serta-merta menyingkirkan lembaga ekonomi lain seperti BUMDes, koperasi lama, atau lembaga keuangan mikro. Justru, koperasi ini mengisi celah yang belum tergarap optimal, seperti penguatan rantai pasok produk lokal, pengelolaan pasar desa, dan distribusi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Di tengah persaingan, KDMP menawarkan pendekatan yang berbeda: ekonomi berbasis solidaritas. Alih-alih bersaing secara agresif, KDMP membangun kolaborasi dengan BUMDes dan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok peternak, kelompok perikanan, dsb, untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas akses pasar bagi produk lokal seperti gula semut, hasil pertanian, dan kerajinan tangan.

Menyadari pentingnya adaptasi, KDMP mulai merambah digitalisasi. Sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi seperti SIMKOPDES diterapkan untuk meningkatkan transparansi. Langkah ini menjadi strategi jitu menghadapi persaingan dengan lembaga ekonomi eksternal yang sudah lebih dulu menguasai pasar digital. Dengan pendekatan yang akuntabel dan partisipatif, koperasi ini berhasil membangun kepercayaan dan loyalitas anggota.

Meski masih berusia dini, Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Hargorejo bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga simbol kebangkitan desa. KDMP menjadi ruang belajar bersama, tempat warga mengasah keterampilan manajerial, memperkuat jejaring usaha, dan menumbuhkan semangat kemandirian. Di tengah persaingan yang makin kompleks, KDMP harus membuktikan bahwa kekuatan kolektif, jika dikelola dengan transparan dan inklusif, mampu menjadi penyeimbang sekaligus penggerak utama ekonomi kalurahan.

Tantangan kedua lembaga, baik itu BUMdesa maupun KDMP adalah keduanya membutuhkan tata kelola yang baik, professional, transparan dan akuntabel. Pemerintahan Kalurahan Hargorejo perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan efektif.

4. Data Aparatur Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal (nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan)

A. Data Lurah dan Pamong Hargorejo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan telah ditetapkan Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo.

Data Lurah dan pamong sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan	Tempat Tanggal Lahir	Surat Pengangkatan Nomor
1.	Bhekti Murdayanto, S.E.	Lurah	S1	Kulon Progo, 07-06-1967	SK Bupati Kulon Progo No. 300/C/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 475/A/2021
2.	Siti Nura'eni	Carik	SMK	Kulon Progo, 26-02-1989	SK Kades No. 27 Tahun 2015
3.	Aprillia Ayu Saputri, S.H.	Danarta	S1	Batam, 03-04-1993	SK Kades No. 11 Tahun 2017
4.	Suripno Budi Waluyo	Panata Laksana sarta Pangripto	D3	Kulon Progo, 29-07-1968	SK Kades No. 4 Tahun 2009
5.	Suharyoto	Jagabaya	SLTA	Kulon Progo, 28-01-1976	SK Kades No. 12 tahun 2005
6.	Savira Dwi Cahyani, S.Pd, I.M M.	Ulu-Ulu	S1	Sampang, 04-03-1983	SK Kades No. 13 tahun 2013
7.	Sukarma	Kamituwa	SLTA	Kulon Progo, 10-04-1965	04/KPTS/141/1991
8.	Hartono	Staf	SLTA	Kulon Progo, 30-04-1962	19/KPTS/141/1990
9.	Yuli Setiyawati, S.Kom	Staf	S1	Jakarta, 23-07-1985	SK Kades No. 36 Tahun 2018
10.	Jemadi	Dukuh Gn.Kukusan	SLTA	Kulon Progo, 20-03-1964	03/KPTS/141/1994
11.	Setiyo	Dukuh Gn. Rego	SMA	Kulon Progo, 01-09-1991	SK Kades No. 81 Tahun 2019
12.	Puji Fatmawati, A.Md, Akt	Dukuh Ngaseman	D3	Kulon Progo, 08-08-1992	SK Kades No. 105 Tahun 2017
13.	Supardi	Dukuh Sambeng	SLTA	Kulon Progo, 15-10-1976	SK Kades No. 19 Tahun 2012
14.	Fauzan	Dukuh Tejogan	SLTA	Kulon Progo, 25-12-1979	SK Kades No. 21 Tahun 2008

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendi dikan	Tempat Tanggal Lahir	Surat Pengangkatan Nomor
15.	Sakiyan	Dukuh Sangkrek	SLTA	Kulon Progo, 17-07-1965	SK Kades No. 24 Tahun 2010
16.	Fahrudin	Dukuh Selo Barat	STM	Kulon Progo, 16-2-1978	SK Kades No. 35 Tahun 2016
17.	R.Nur Hidayanto	Dukuh Selo Timur	SLTP	Kulon Progo, 14-10-1969	SK Kades No. 6 Tahun 2008
18.	Tata Sabila Rasyad	Dukuh Pandu	SMA	Kulon Progo, 13-05-2001	SK Lurah No. 58 Tahun 2022
19.	Saifudin	Dukuh Anjir	SLTA	Kulon Progo, 10-07-1977	SK Kades No. 22 Tahun 2008
20.	Setya Hariyanta	Dukuh Kliripan	SLTA	Kulon Progo, 01-06-1971	SK Kades No. 5 Tahun 2008
21.	Widhi Kurniastuti, A.Md.KL.	Dukuh Penggung	D3	Jombang, 03-12-1993	SK Lurah No. 57 Tahun 2022
22.	Rusidi	Dukuh Krengseng	SLTP	Kulon Progo, 13-02-1970	09/KPTS/PEM/2002
23.	Ahmad Safrudin	Dukuh Sindon	SLTA	Kulon Progo, 18-01-1977	SK Kades No. 23 Tahun 2010
24.	Ulin Nuha (TMT 20 Desember 2023)	Dukuh Ngulakan	SLTA	Kulon Progo, 27-04-2000	SK Lurah No. 87 Tahun 2023
25.	Novi Nurhasanah,S.E.	Dukuh Kriyan	S1	Kebumen, 17-03-1996	SK Lurah No. 56 Tahun 2022

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan pasal 118 mengatur bahwa Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, kedua atau ketiga menyelesaikan masa jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah ditetapkan SK Bupati Kulon Progo No. 300/C/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 tentang Perubahan atas

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 475/A/2021 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Lurah Terpilih Hasil Pemilihan Lurah Hargorejo Tahun 2021 dan Pengangkatan Saudara Bhekti Murdayanto, S.E sebagai Lurah Hargorejo Kapananewon Kokap Masa Jabatan Tahun 2021-2027. Mengubah masa jabatan Saudara Bhekti Murdayanto, S.E. sebagai Lurah Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo dari semula masa jabatan Tahun 2021-2027 menjadi masa jabatan Tahun 2021-2029. (berakhir masa jabatan pada tanggal 30 November 2029)

B. Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo

Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 129/A/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo Masa jabatan Tahun 2020-2026

No	Nama	Jabatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	Koesdiono	Ketua	Banyumas ,1 Desember 1960	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Sangkrek Rt 51 Rw 13 Hargorejo Kokap Kp
2	Sri Widada,SIP,MM	Wakil Ketua	Palembang , 1 Februari 1969	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penggung Rt 74 Rw 21 Hargorejo , Kokap, KP
3	Ari Kiswanto,A.Md	Sekretaris	Kulon Progo,13 November 1975	Wiraswasta	Gunung Rego Rt 17 Rw 05, Hargorejo

No	Nama	Jabatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
4	Sugiyanto, S.Pd.SD	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo,07 Oktober 1980	Karyawan honorer	Pandu Rt 83 Rw 24 Hargorejo Kokap KP
5	Drs. Suyatno	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo,8 Maret 1958	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Selo Timur Rt 61 Rw 17, Hargorejo, Kokap, KP
6	Widianto, A Md	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo,4 Januari 1980	Wiraswasta	Ngulakan Rt 110 Rw 32, Hargorejo, Kokap, KP
7	Denik Srileksonowati	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo,17 Februari 1976	Wiraswasta	Ngaseman Rt 25 Rw 07, Hargorejo, Kokap, KP

No	Nama	Jabatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
8	Hendro Kurniawan	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo, 24 Mei 1990	Wiraswasta	Sindon Rt 105 Rw 30 Hargorejo Kokap, KP
9	Kadir	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo, 14 April 1971	Petani/Pekebun	Gunung Rego Rt 20 Rw 05 Hargorejo Kokap KP

Seiring pencalonan Lurah dan dengan pengunduran diri ketua, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 213/A/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Koesdiono dari Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2020-2026 dan ditetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 214/A/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pengesahan Peresmian Saudara Sadiman sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2020-2026.

Yang kemudian ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo tanggal 19 Juli 2021 dengan susunan personalia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	Sri Widada,SIP,MM	Ketua	Palembang, 1 Februari 1969	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pengging Rt 74 Rw 21 Hargorejo, Kokap, KP
2	Drs. Suyatno	Wakil Ketua	Kulon Progo,8 Maret 1958	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Selo Timur Rt 61 Rw 17, Hargorejo, Kokap, KP
3	Ari Kiswanto,A.Md	Sekretaris	Kulon Progo,13 November 1975	Wiraswasta	Gunung Rego Rt 17 Rw 05, Hargorejo
4	Sugiyanto, S.Pd.SD	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo,07 Oktober 1980	Karyawan honorer	Pandu Rt 83 Rw 24 Hargorejo Kokap KP
5	Widianto, A Md	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo,4 Januari 1980	Wiraswasta	Ngulakan Rt 110 Rw 32 ,Hargorejo ,Kokap, KP
6	Hendro Kurniawan	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo,24 Mei 1990	Wiraswasta	Sindon Rt 105 Rw 30 Hargorejo Kokap, KP
7	Kadir	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo,14 April 1971	Petani/ Pekebun	Gunung Rego Rt 20 Rw 05 Hargorejo Kokap KP

No	Nama	Jabatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
8	Denik Srileksonowati	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo, 17 Februari 1976	Wiraswasta	Ngaseman Rt 25 Rw 07, Hargorejo, Kokap, KP
9	Sadiman	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo, 15 Juli 1957	Pensiunan	Gunung Kukusan, Rt 5 Rw 2, Hargorejo, Kokap, KP

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, dan pasal 118 mengatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada periode pertama, kedua atau ketiga menyelesaikan masa jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah ditetapkan SK Bupati Kulon Progo No. 357/C/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 129/A/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2020-2026. Mengubah masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo dari semula masa jabatan Tahun 2020-2026 menjadi masa jabatan Tahun 2020-2028. (berakhir masa jabatan pada 1 April 2028)

BAB. II KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN

Pemerintah Kalurahan dalam hal ini Lurah Hargorejo dan pamong dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan memiliki kebijakan yang terangkum dalam Visi dan Misi Lurah definitif yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

A. Visi.

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Kalurahan Hargorejo disamping merupakan Visi – Misi Calon Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat kalurahan dimana proses pembangunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan dan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai keinginan bersama masyarakat maka Pemerintah Kalurahan Hargorejo mempunyai Visi sebagai berikut :

“Membangun Kalurahan Hargorejo Dengan Kebersamaan Untuk Melanjutkan Program Dan Percepatan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera”.

B. Misi

Misi Kalurahan Hargorejo merupakan penjabaran yang lebih operasional dari pada visi. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada, maka disusunlah misi untuk mencapai visi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, ketrampilan, dan pembinaan keagamaan.
2. Membangun infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian.
3. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kebersamaan masyarakat, Kelembagaan dan Pemerintahan Kalurahan untuk mendukung tercapainya kemajuan Kalurahan Hargorejo.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna tercapainya kemandirian ekonomi masyarakat.
6. Optimalisasi pengolaan potensi Kalurahan Hargorejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl).
7. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya kearifan lokal serta pariwisata.

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan)

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi kalurahan sehingga masyarakat akan lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Agar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdapat kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh kalurahan, maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan landasan berpijak antara legislatif dan eksekutif. Arah kebijakan umum pembangunan kalurahan yang mengandung arti sebagai operasional dari visi dan agenda pembangunan untuk jangka waktu tertentu dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Permasalahan kalurahan yang mendesak dan harus segera diatasi.
- b) Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan di masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil yang semua itu dapat dijaring melalui mekanisme formal.
- c) Kemampuan kalurahan khususnya pendanaan pembangunan, sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada.

Arah Kebijakan Umum Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2022-2027 secara umum adalah untuk dapat mendorong dan mengembangkan potensi kalurahan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun arah kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

D. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
- 8) Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
- 9) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 10) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll);
- 11) Pemutakhiran Profil Desa;
- 12) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa;
- 13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes;
- 14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
- 15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes dan lain-lain);

- 16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait); Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 17) Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 18) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
- 19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat;
- 20) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 21) Dukungan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa;
- 22) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- 23) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- 24) Administrasi Pertanahan; dan
- 25) Mediasi Konflik Pertanahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- 2) Pembangunan PAUD;
- 3) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
- 4) Penyelenggaraan Posyandu;
- 5) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman;

- 8) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- 10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
- 11) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;;
- 12) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa; dan
- 13) Pengembangan Pariwisata Milik Desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (satlinmas Desa);
- 2) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- 3) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- 5) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
- 6) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- 7) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kpemudaan/ Klub Olah raga;
- 8) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD;
- 9) Pembinaan PKK; dan

10) Pelatihan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan;
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
- 4) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
- 5) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
- 6) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- 1) Keadaan Darurat; dan
- 2) Keadaan Mendesak

BAB. III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan perundangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan yang memprioritaskan terhadap kebutuhan riil masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan. Dimana dalam APB Kalurahan memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 10 Tahun 2024 tertanggal 20 Desember 2025. Seiring berjalannya waktu dengan adanya pengurangan dalam

pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan dan pergeseran antar jenis anggaran sehingga mengakibatkan harus dilakukan perubahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 13 Maret 2025 dan Perubahan regular dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 26 Agustus 2025.

Berikut kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan pada tanggal 15 Desember 2025 dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

		ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Desa	Rp	4.338.322.758,00	4.284.048.511,95
Belanja Desa	Rp	4.252.189.549,00	3.930.586.979,00
Surplus/Defisit	Rp	86.133.209,00	353.461.532,95
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	Rp	218.366.791,00	218.366.791,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	304.500.000,00	310.050.105,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(86.133.209,00)	(91.683.314,00)
SILPA	Rp	0,00	261.778.218,95

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Realisasi Kegiatan Bidang Pemerintahan Kalurahan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri dari 5 sub bidang yang dituangkan dan teranggarkan dalam 25 rencana program kegiatan dan terlaksana 24 kegiatan, terlaksana dengan prosentase 93,48% dan tidak terlaksana 6,52%.

Adapun 1 kegiatan yang tidak terealisasi adalah Kegiatan Administrasi Pertanahan dengan Sub Kegiatan Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 8/IZ/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk melepaskan TKD kepada Dinas PU, Kabupaten Kulon Progo untuk Pembangunan Drainase pada Tanah Kas Desa SHP. 0070 di Padukuhan Kriyan sehingga di dalam anggaran nilai ganti rugi tidak mencukupi untuk pengadaan tanah.

Merujuk pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan dalam pasal 74 ayat (1) Dalam hal terdapat uang hasil pelepasan tanah kalurahan yang belum dibelikan tanah pengganti sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Kalurahan wajib memindahbukukan ke rekenig Kasultanan atau Kadipaten. Dengan demikian mempertimbangkan anggaran nilai ganti rugi dan memperhatikan kemampuan keuangan kalurahan akan menindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam beberapa kegiatan juga muncul sisa lebih pagu anggaran yang disebabkan Perencanaan dalam penganggaran berdasarkan SHBJ sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar dan

pengoptimalan penggunaan waktu sehingga muncul efisiensi kegiatan maupun anggaran.

B. Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan terdiri dari 6 sub bidang yang dituangkan dan dianggarkan dalam 13 rencana program kegiatan, terlaksana 12 kegiatan dengan prosentase 91,17% dan tidak terlaksana 8,83%.

Adapun 1 kegiatan yang tidak terealisasi adalah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa penghubung Padukuhan Gunung Kukusan dan Gunung Rego yang disebabkan keterbatasan anggaran, terdampak refocusing anggaran guna penyertaan modal Ketahanan Pangan.

Dalam beberapa kegiatan juga muncul sisa lebih pagu anggaran yang disebabkan Perencanaan dalam penganggaran berdasarkan SHBJ sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar.

C. Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari 4 sub bidang yang dituangkan dan dianggarkan dalam 10 rencana program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 74,14% dan tidak terlaksana 25,86%.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kegiatan terkendala sumber anggaran/ pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Bagi Hasil Pajak/ Retribusi yang realisasinya tidak bisa ditentukan serta menjelang masa akhir penatausahaan.

Adapun kendala juga dipengaruhi oleh kelembagaan yang tidak optimal.

Dalam beberapa kegiatan juga muncul sisa lebih pagu anggaran yang disebabkan Perencanaan dalam

penganggaran berdasarkan SHBJ sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar.

D. Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari 4 sub bidang yang dituangkan dan dianggarkan dalam 6 rencana program kegiatan, terlaksana 5 kegiatan dengan prosentase 99,52% dan tidak terlaksana 0,48%.

Adapun 1 kegiatan yang tidak terlaksana adalah pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas). Kegiatan bersifat insidental sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan dan di tahun 2025 tidak ada ODGJ yang perlu penanganan tindak lanjut/ perlu diantar ke RS Jiwa.

Dalam beberapa kegiatan juga muncul sisa lebih pagu anggaran yang disebabkan Perencanaan dalam penganggaran berdasarkan SHBJ sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar.

E. Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa maka kewenangan lokal skala Kalurahan terkait hal tersebut mempunyai pos tersendiri yang dibagi dalam sub bidang dan sesuai kebutuhan desa.

Mendasar pada hasil musyawarah Kalurahan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan disepakati digunakan untuk Sub Bidang Keadaan Darurat sebagaimana amanat Peraturan Bersama Lurah Hargomulyo, Lurah Hargorejo, Lurah Hargowilis, Lurah Kalirejo dan Lurah Hargotirto tentang Pendirian BUM Desa Bersama yang digunakan secara

khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan rumah tangga miskin yang bersifat insidental. Pos kegiatan tersebut dituangkan dalam Keadaan Darurat, adapun penyerapan Rp0,- sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Sub Bidang Keadaan Mendesak berupa program penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan jumlah sasaran sejumlah 37 Keluarga Penerima Manfaat dan diterimakan dalam triwulan selama 1 tahun anggaran melalui BUM Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.

Penyaluran triwulan pertama dibarengkan dengan triwulan kedua pada tanggal 11 April 2025, triwulan ketiga pada tanggal 15 Juli 2025 dan terilulan ke-empat disalurkan pada tanggal 16 Oktober 2025 sejumlah 30 KPM sedangkan 7 KPM disalurkan pada tanggal 23 Oktober 2025 dikarenakan 5 KPM semula menerima program PKH dan 2 KPM semula menerima BPNT APBN sehingga pada triwulan keempat dialihkan berdasarkan pada hasil musyawarah kalurahan khusus yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025.

F. Pelaksanaan Tugas Lainnya (tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten)

Program maupun kegiatan yang dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dikerjakan/dilaksanakan di wilayah Kalurahan Hargorejo sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan berupa kegiatan Rekonstruksi Jalan Lokal Primer di ruas Kokap-Kalirejo di Padukuhan Gunung Kukusan dan kegiatan Talud dan Bronjong Jalan Propinsi Tegalsari-Klepu di Padukuhan Gunung Rego;

- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja berupa kegiatan padat karya infrastruktur hibah kepada LPMK di Padukuhan Penggung;
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Padukuhan Sangkreng;
- 4) Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berupa kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Pengerukan Drainase Kriyan) di Padukuhan Kriyan dan kegiatan Bronjong Pengaman Sungai di Padukuhan Pandu;
- 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat berupa kegiatan Bantuan Sosial Jamban Sehat di Padukuhan Gunung Kukusan, Penggung, Selo Timur, Anjir, Kriyan, Gunung Rego dan kegiatan Bantuan Toolkit Posyandu di Padukuhan Pandu;
- 6) Program Program Kawasan Permukiman berupa kegiatan Bantuan Sosial RTLH dan Bantuan Sosial Rehab Rumah ALADIN (Atap, Lantai, Dinding);
- 7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup berupa kegiatan Penanaman Pohon di Daerah Tangkapan sekitar mata Air dan sempadan sungai yang melibatkan KTH Wonoardi Sambeng, KTH Wonodadi Pandu, KTH Luwes Anjir, KTH Taruna Tani Selo Timur;
- 8) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian berupa kegiatan Bantuan Pupuk, Bantuan pengembangan Kawasan Kelapa Genjah Khusus, Bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian): pompa dan power cruiser, Bantuan Benih jagung, Program Pangan Bergizi (PPB);

- 9) Program Pengembangan Tempat Ibadah berupa kegiatan Kalibrasi Arah Kiblat dan Pengembangan sarpras Masjid;
- 10) Bantuan Sosial (Bansos) meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLTS Kesra, Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Bantuan Lansia, Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (Jamsos PBI), Bantuan Pangan Beras;
- 11) Program Pengabdian Masyarakat (PPM) berupa kegiatan Dokumentasi Mantan Dukuh, Digitalisasi Peta Padukuhan, Papan nama Balai Padukuhan dan Pembuatan pintu induk mata air Mudal, Restocking ikan di Sungai Mudal, Pengembangan Yayasan Ar Rohman, Pelatihan dan pengembangan batik Ecoprint, Program Pemanfaatan Limbah;
- 12) Program Swadaya Masyarakat berupa kegiatan Pembukaan jalan tembus di RT 085-091 Anjir, Pengecoran isi tengah di RT 098/028 Krengseng, Gorong-gorong di RT 100/027 Krengseng, Rehabilitasi Gorong-gorong Ruas jalan Pandu-Sambeng di RT 039/010 Tejogan, Pembangunan corblok ful beton di RT 040/011 Tejogan, Rekonstruksi jalan lingkungan di RT 084 & 080/023 Pandu, LPJU Jalan Lingkungan di RT 011-015, RT 020/004 Gunung Rego, Pembangunan Dapur dan Gudang Masjid Al-Jihad di RT 010/005 Gunung Rego, Pembangunan corblok di RT 020/005 Gunung Rego, Pembangunan talud pengaman jalan di RT 021/006 Ngaseman, Pembangunan jalan dan pemeliharaan jaringan air di RT 07-08 Gunung Kukusan, Pembangunan Gorong-gorong dan perbaikan drainase di RT 051/015 Sangkrek, LPJU Jalan Lingkungan di RT 51-49 Sangkrek, Restrukturisasi

Jalan Desa di RT 49-50 Sangkrek dan Restrukturisasi Jalan Lingkungan di RT 111 Ngulakan;

- 13) Program Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa berupa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani di Padukuhan Sangkrek; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Lingkungan Permukiman/Gang dan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana Jalan Desa (Talud) di Padukuhan Sambeng; Pembangunan Gedung PAUD di Padukuhan Ngaseman.

Dari rekapitan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan Tahun 2025 tersebut teridentifikasi swadaya masyarakat dengan total anggaran sekitar Rp 342.710.000,00

BAB. V PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2025 ini kami sampaikan dan kami menyadari Laporan ini masih jauh dari sempurna, hal ini merupakan keterbatasan kemampuan yang kami miliki dalam penyusunan laporan, namun tetap mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk itu kami mengharap saran dan masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk perbaikan sistem pelaporan ke depan yang lebih baik.

Dengan Laporan ini semoga Pemerintahan Kalurahan Hargorejo dapat melaksanakan Program Pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan kesulitan serta mampu membangun Kalurahan dengan semangat kebersamaan demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak sehingga kehidupan masyarakat Kalurahan lebih maju dan sejahtera.

Hargorejo, 19 Januari 2026

 LURAH HARGOREJO, 
BHEKTI MURDAYANTO, S.E.



LURAH HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO



LURAH HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2026
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Hargorejo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 77);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 129);
 21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 40);
 22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 68);
 23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 11);
 24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 37);
 25. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 53);
 26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 16);
 27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 68);
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 81);
 29. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 14);
 30. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 31. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Desa Hargorejo Tahun 2017 Nomor 9);
 32. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Desa Hargorejo Tahun 2019 Nomor 13);
 33. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2020 Nomor 8);
 34. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2022 Nomor 5);
 35. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2024 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025

- (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2024 Nomor 9);
36. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2024 Nomor 8);
 37. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Kalurahan untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2025 Nomor 3);
 38. Peraturan Kaluraha Hargorejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2025 Nomor 7);
 39. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2025 Nomor 8); dan
 40. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Hargorejo Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO
dan
LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN HARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Hargorejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

		ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Desa	Rp	4.338.322.758,00	4.284.048.511,95
Belanja Desa	Rp	4.252.189.549,00	3.930.586.979,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>86.133.209,00</u>	<u>353.461.532,95</u>
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	Rp	218.366.791,00	218.366.791,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	304.500.000,00	310.050.105,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(86.133.209,00)</u>	<u>(91.683.314,00)</u>
SILPA	Rp	<u>0,00</u>	<u>261.778.218,95</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi APB Kalurahan;
- b. Lampiran II : Catatan atas Laporan Keuangan;
- c. Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan;
- d. Lampiran IV : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal 15 Januari 2026


LURAH HARGOREJO,
BHEKTI MURDAYANTO

Diundangkan di Hargorejo

pada tanggal 15 Januari 2026

CARIK HARGOREJO,


SITI NURA' ENI

LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO TAHUN 2026 NOMOR 1

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1 / KB / Bamuskal/ 2026

NOMOR : 1 / KB / Pemkal /2026

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Balai Kalurahan Hargorejo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

MENYEPAKATI BERSAMA

Rancangan Peraturan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten
Kulon Progo tentang:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

MENJADI

Peraturan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo
tentang:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo dan Lurah Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN HARGOREJO, d.



SRI WIDADA, S.IP, M.M.



BHEKTI MURDAYANTO, S.E.

LAMPIRAN I
LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN
HARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		130.727.300,00	121.495.332,00	9.231.968,00
Pendapatan Transfer		4.095.835.358,00	4.046.969.861,00	48.865.497,00
Dana Desa		1.521.025.000,00	1.521.025.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		251.503.243,00	202.637.746,00	48.865.497,00
Alokasi Dana Desa		1.126.307.115,00	1.126.307.115,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		111.760.100,00	115.583.318,95	3.823.218,95
JUMLAH PENDAPATAN		4.338.322.758,00	4.284.048.511,95	54.274.246,05
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.716.760.604,00	1.604.877.519,00	111.883.085,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.159.283.470,00	1.056.931.885,00	102.351.605,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		322.991.375,00	239.476.600,00	83.514.775,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		900.419.200,00	896.100.995,00	4.318.205,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		152.734.900,00	133.200.000,00	19.534.900,00
JUMLAH BELANJA		4.252.189.549,00	3.930.586.979,00	321.602.570,00
SURPLUS / (DEFISIT)		86.133.209,00	353.461.532,95	(267.328.323,95)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		218.366.791,00	218.366.791,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		304.500.000,00	310.050.105,00	5.550.105,00
PEMBIAYAAN NETTC		(86.133.209,00)	(91.683.314,00)	5.550.105,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	261.778.218,95	(261.778.218,95)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

HARGOREJO, 31 Desember 2025
LURAH HARGOREJO

BHEKTI MURDAYANTO, S.E



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.727.300,00	121.496.332,00	9.231.968,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	20.137.300,00	20.137.300,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	110.590.000,00	101.359.032,00	9.231.968,00
4.2.	Pendapatan Transfer	4.096.836.358,00	4.046.969.861,00	49.866.497,00
4.2.1.	Dana Desa	1.521.025.000,00	1.521.025.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	251.603.243,00	202.637.746,00	48.965.497,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.126.307.115,00	1.126.307.115,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	111.760.100,00	116.683.318,95	(3.923.218,95)
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	39.610.100,00	39.610.100,00	0,00
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	8.823.218,95	(3.823.218,95)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.338.322.758,00	4.284.048.611,95	54.274.146,05
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	1.010.361.676,00	1.010.196.992,00	164.684,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.151.360,00	53.151.360,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	827.802.498,00	827.637.914,00	164.684,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.207.718,00	55.207.718,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.728.910.574,00	1.489.648.462,00	239.262.112,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	564.414.235,00	435.855.595,00	128.558.640,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	553.117.000,00	534.514.600,00	18.602.400,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	8.125.000,00	2.995.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	45.660.500,00	29.800.000,00	15.860.500,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	133.044.339,00	88.696.327,00	44.348.012,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	36.753.100,00	36.272.100,00	481.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	386.801.400,00	358.384.840,00	28.416.560,00
5.3.	Belanja Modal	1.360.182.499,00	1.297.641.825,00	62.640.674,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7.949.623,00	0,00	7.949.623,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	143.420.231,00	140.315.000,00	3.104.331,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.047.496.470,00	996.317.125,00	51.179.345,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	144.160.200,00	143.785.000,00	375.200,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	17.155.975,00	17.123.600,00	32.475,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	182.734.900,00	133.200.000,00	49.534.900,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	152.734.900,00	133.200.000,00	19.534.900,00
	JUMLAH BELANJA	4.252.189.549,00	3.930.586.979,00	321.602.570,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	86.133.209,00	353.461.532,95	(267.328.323,95)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	218.366.791,00	218.366.791,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	210.417.168,00	210.417.168,00	0,00
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	7.949.623,00	7.949.623,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	304.500.000,00	310.050.105,00	(5.550.105,00)
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	304.500.000,00	304.500.000,00	0,00
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	5.550.105,00	(5.550.105,00)
	PEMBIAYAAN NETTC	(86.133.209,00)	91.683.314,00	5.550.105,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	261.778.218,95	(261.778.218,95)

HARGOREJO, 31 Desember 2025
LURAH HARGOREJO

BHEKTI MURDAYANTO, S.E



LAMPIRAN II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN HARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2025

Daftar Isi

	halaman
I. Laporan Realisasi APB Kalurahan	
II. Catatan Atas Lapoaran Keuangan	1
A. Informasi Umum	1
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	1
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	1
2. Pendapatan Asli Kalurahan	2

3. Dana Kalurahan	2
4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.....	3
5. Alokasi Dana Kalurahan	3-4
6. Bantuan Keuangan Propinsi	4
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	4
8. Pendapatan Lain-lain	4-5
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.....	5
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.....	5-6
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.....	6
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.....	6
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan.....	6
14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi.....	7-8
15. Belanja KalurahaN dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	8-9
16. Pembiayaan	9-10
17. Aset Kalurahan	10
18. Penyertaan Modal Kalurahan	10

Lampiran

- Laporan Kekayaan Milik Desa
- Laporan Realisasi Kegiatan
- Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk Kalurahan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2025

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Hargorejo merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 8 Agustus 2019, dengan susunan organisasi Pemerintahan Kalurahan Hargorejo sebagai berikut:

1. Lurah : Bhkti Murdayanto, S.E.
2. Carik : Siti Nura'eni
3. Bendahara Kalurahan : Aprillia Ayu Saputri, SH

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamatkan di RT 120 RW 36 Padukuhan Kriyan, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APB Kalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas Kalurahan dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	
SILPA Tahun Anggaran 2025	261.778.218,95
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	163.793.821
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan 2025	163.793.821
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0
Saldo Kas per 31 Desember 2025	261.778.218,95

2. Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	20.137.300	20.137.300	0
b. Hasil Aset	110.590.000	101.358.032	9.231.968
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong	0	342.710.000	342.710.000
d. Lain-lain PA Kalurahan yang sah	0	0	0

3. Dana Kalurahan

Dana Kalurahan merupakan penerimaan Kalurahan yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Kalurahan selama tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
DD Earmark Tahap I	463.634.220	463.634.220	0
DD Non Earmark Tahap I	448.980.780	448.980.780	0
DD Earmark Tahap II	309.089.480	309.089.480	0
DD Non Earmark Tahap II	299.320.520	299.320.520	0
Jumlah	1.521.025.000	1.521.025.000	0

4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	48.865.497	0	48.865.497
Tahap 2	8.258.153	8.258.153	0
Tahap 3	9.831.656	9.831.656	0
Tahap 4	11.210.061	11.210.061	0
Tahap 5	13.420.426	13.420.426	0
Tahap 6	15.697.806	15.697.806	0
Tahap 7	17.032.185	17.032.185	0
Tahap 8	16.600.261	16.600.261	0
Tahap 9	54.429.330	54.429.330	0
Tahap 10	17.068.842	17.068.842	0
Tahap 11	11.128.935	11.128.935	0
Tahap 12	27.960.091	27.960.091	0
Jumlah	251.503.243	202.637.746	48.865.497

5. Alokasi Dana Kalurahan (ADK)

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Kalurahan adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	88.741.546	88.199.166	542.380
Tahap 2	73.387.008	72.844.628	542.380
Tahap 3	156.191.511	155.649.131	542.380
Tahap 4	80.426.777	79.884.397	542.380
Tahap 5	81.159.627	80.617.247	542.380
Tahap 6	147.973.477	147.431.097	542.380
Tahap 7	78.029.177	77.486.797	542.380
Tahap 8	82.870.332	82.304.440	565.892
Tahap 9	81.134.232	80.568.340	565.892
Tahap 10	85.160.032	84.594.140	565.892

Tahap 11	85.616.698	85.050.806	565.892
Tahap 12	85.616.698	85.050.806	565.892
Jumlah	1.126.307.115	1.119.680.995	6.626.120

Kekurangan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp 6.626.120,- merupakan potongan 1% atas siltap lurah dan pamong yang telah digunakan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh kabupaten.

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari bantuan Keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	358.000.000	358.000.000	0
Tahap 2	100.000.000	100.000.000	0
Tahap 3	195.000.000	195.000.000	0
Tahap 4	444.000.000	444.000.000	0
Tahap 5	100.000.000	100.000.000	0
Jumlah	1.197.000.000	1.197.000.000	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Kulon Progo nihil.

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kalurahan	39.610.100	39.610.100	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan	60.000.000	60.000.000	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan	0	0	0
Bunga bank	5.000.000	8.823.218,95	(3.823.218,95)
Lain-lain pendapatan yang sah	7.150.000	7.150.000	0
Jumlah	111.760.100	115.583.318,95	(3.823.218,95)

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Pegawai	1.010.361.576	1.010.196.992	164.584
Belanja Barang dan Jasa	538.373.199	437.741.127	100.632.072
Belanja Modal	168.025.829	156.939.400	11.086.429
Jumlah	1.716.760.604	1.604.877.519	111.883.085

10. Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan

Belanja untuk Bidang Pembangunan Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	769.126.800	718.102.695	51.024.105
Belanja Modal	390.156.670	338.829.170	51.327.500
Jumlah	1.159.283.470	1.056.931.865	102.351.605

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	322.991.375	239.476.600	83.514.775
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	322.991.375	239.476.600	83.514.775

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	98.419.200	94.328.040	4.091.160
Belanja Modal	802.000.000	801.772.955	227.045
Jumlah	900.419.200	896.100.995	4.318.205

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan

Selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.534.900	0	19.534.900
Keadaan Darurat	0	0	0
Keadaan Mendesak	133.200.000	133.200.000	0
Jumlah	152.734.900	133.200.000	19.534.900

14. Belanja Kalurahan dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	53.151.360	53.151.360	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	827.802.498	827.637.914	164.584
Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	55.207.718	55.207.718	0
Tunjangan BPK	74.200.000	74.200.000	0
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang perlengkapan Kantor	564.414.235	435.855.595	128.558.640
Belanja Jasa Honorarium	553.117.000	534.514.600	18.602.400
Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000	6.125.000	2.995.000
Belanja Jasa Sewa	45.660.500	29.800.000	15.860.500
Belanja Operasional Perkantoran	133.044.339	88.696.327	44.348.012
Belanja Pemeliharaan	36.753.100	36.272.100	481.000
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	386.801.400	358.384.840	28.416.560
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	7.949.623	0	7.949.623
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat	143.420.231	140.315.900	3.104.331
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.047.496.470	996.317.125	51.179.345
Belanja Modal Jalan	144.160.200	143.785.000	375.200
Belanja Modal Jembatan	0	0	0
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0	0	0

Belanja Modal lainnya	17.155.975	17.123.500	32.475
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	152.734.900	133.200.000	19.534.900

15. Belanja Kalurahan dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.716.760.604	1.604.877.519	111.883.085
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.209.144.415	1.184.738.469	24.405.946
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	156.740.606	152.294.900	4.445.706
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	120.322.937	118.175.300	2.147.637
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	181.510.523	146.346.250	35.164.273
Sub Bidang Pertanahan	49.042.123	3.322.600	45.719.523
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.159.283.470	1.056.931.865	102.351.605
Sub Bidang Pendidikan	502.709.870	441.943.665	60.766.205
Sub Bidang Kesehatan	312.204.200	271.714.200	40.490.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.160.200	143.785.000	375.200
Sub Bidang Kawasan Permukiman	195.000.000	195.000.000	0
Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan	2.664.200	2.084.000	580.200
Sub Bidang Pariwisata	2.545.000	2.405.000	140.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	322.991.375	239.476.600	83.514.775
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	108.329.100	92.848.500	48.403.475

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	141.251.975	92.848.500	48.403.475
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	51.537.000	49.832.900	1.704.100
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.873.300	14.764.500	7.108.800
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	900.419.200	896.100.995	4.318.205
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	890.925.100	888.603.395	2.321.705
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	0	0
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.771.500	0	1.771.500
Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan	0	0	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.035.000	2.810.000	225.000
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.687.600	4.687.600	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	152.734.900	133.200.000	19.534.900
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Darurat	19.534.900	0	19.534.900
Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000	133.200.000	0

16. Pembiayaan

Jumlah Netto Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	218.366.791	218.366.791	0
Pengeluaran Pembiayaan	304.500.000	310.050.105	(5.550.105)
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	210.417.168	210.417.168	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3. Hasil penjualan Kekayaan Kalurahan yang	7.949.623	7.949.623	0

dipisahkan			
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Kalurahan	304.500.000	304.500.000	0
3. Setor Kembali Pendapatan Transfer	0	5.550.105	(5.550.105)

17. Aset Kalurahan

Perolehan aset kalurahan adalah sebagai berikut:

	2024	2025	Penambahan/ Pengurangan
Tanah	0	0	0
Peralatan, Mesin dan Alat Berat	86.283.000	140.315.900	140.315.900
Gedung dan Bangunan	78.457.250	993.426.125	993.426.125
Jalan, Irigasi dan Jaringan	488.149.325	142.451.250	142.451.250
Jembatan	0	0	0
Jaringan/Instalasi	0	0	0
Aset Tetap lainnya	2.971.000	500.000	500.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran I

18. Penyertaan Modal Kalurahan

Penyertaan Modal Kalurahan pada BUM Desa Bersama adalah sebagai berikut:

	2024	2025	Penambahan/ Pengurangan
BUM Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo	0	304.500.000	304.500.000
BUM Desma Sejahtera Mandiri Kapanewon Kokap	0	0	0

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	261.778.218,95	218.366.791,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	261.778.218,95	218.366.791,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.2.09.	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	261.778.218,95	218.366.791,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	304.500.000,00	0,00
	Jumlah Investasi	304.500.000,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	140.315.900,00	86.283.000,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	993.428.125,00	78.457.250,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.451.250,00	488.149.325,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	500.000,00	2.971.000,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap	1.278.693.275,00	655.860.575,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	16.623.500,00	3.200.000,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	16.623.600,00	3.200.000,00
	JUMLAH ASET	1.859.694.993,95	877.427.366,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	1.597.816.775,00	659.060.575,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	261.778.218,95	218.366.791,00
	Jumlah Ekuitas	1.859.594.993,95	877.427.366,00
	JUMLAH EKUITAS	1.859.594.993,95	877.427.366,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.859.694.993,95	877.427.366,00

HARGOREJO, 31 Desember 2025

LURAH HARGOREJO



BHEKTI MURDAYANTO, S.E

LAMPIRAN III
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.727.300,00	121.495.332,00	9.231.968,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	20.137.300,00	20.137.300,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	19.540.000,00	19.540.000,00	0,00
	4.1.1.90.	Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa Bersama	167.800,00	167.800,00	0,00
	4.1.1.91.	Lain-lain Hasil Usaha Desa	429.500,00	429.500,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	110.590.000,00	101.358.032,00	9.231.968,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	90.000.000,00	82.544.032,00	7.455.968,00
	4.1.2.03.	Pasar Desa	4.000.000,00	3.214.000,00	786.000,00
	4.1.2.07.	Kios Milik Desa	5.040.000,00	4.200.000,00	840.000,00
	4.1.2.08.	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Mil	1.950.000,00	1.200.000,00	750.000,00
	4.1.2.90.	Hasil Bangunan Desa	5.600.000,00	6.200.000,00	(600.000,00)
	4.1.2.93.	Hasil Mata Air Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.095.835.358,00	4.046.969.861,00	48.865.497,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.521.025.000,00	1.521.025.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.521.025.000,00	1.521.025.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	251.503.243,00	202.637.746,00	48.865.497,00
	4.2.2.01.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kal	251.503.243,00	202.637.746,00	48.865.497,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.126.307.115,00	1.126.307.115,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.126.307.115,00	1.126.307.115,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	111.760.100,00	115.583.318,95	(3.823.218,95)
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	39.610.100,00	39.610.100,00	0,00
	4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	39.610.100,00	39.610.100,00	0,00
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	4.3.3.01.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlok	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	0,00	0,00	0,00
	4.3.5.01.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	8.823.218,95	(3.823.218,95)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	5.000.000,00	8.823.218,95	(3.823.218,95)
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
	4.3.7.95.	Lain-lain Pendapatan Desa	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN			4.338.322.758,00	4.284.048.511,95	54.274.246,05

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	5.	BELANJA			
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.719.760.604,00	1.604.877.819,00	111.883.085,00
1.1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan	1.209.144.415,00	1.184.738.469,00	24.405.946,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.151.360,00	53.151.360,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	53.151.360,00	53.151.360,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.151.360,00	53.151.360,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	41.961.600,00	41.961.600,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	11.189.760,00	11.189.760,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	827.802.498,00	827.637.914,00	164.584,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	827.802.498,00	827.637.914,00	164.584,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	827.802.498,00	827.637.914,00	164.584,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	648.830.400,00	648.665.816,00	164.584,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	178.972.098,00	178.972.098,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.207.718,00	55.207.718,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	55.207.718,00	55.207.718,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.207.718,00	55.207.718,00	0,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	2.257.176,00	2.257.176,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.818.424,00	2.818.424,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	42.713.208,00	42.713.208,00	0,00
1.1.3	5.1.3.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendi	6.310.409,00	6.310.409,00	0,00
1.1.3	5.1.3.92.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawara	1.308.501,00	1.308.501,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan)	134.607.239,00	119.709.477,00	14.897.762,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.607.239,00	119.709.477,00	14.897.762,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	49.027.400,00	43.347.050,00	5.680.350,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	5.960.100,00	5.960.100,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/P	1.083.000,00	1.082.350,00	650,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	7.956.500,00	7.110.900,00	845.600,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	1.002.800,00	1.002.800,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makarv	12.775.000,00	7.941.000,00	4.834.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	20.250.000,00	20.249.900,00	100,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	6.125.000,00	2.995.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	9.120.000,00	6.125.000,00	2.995.000,00
1.1.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.250.000,00	820.000,00	1.430.000,00
1.1.4	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	820.000,00	1.430.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	57.754.839,00	52.978.827,00	4.776.012,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	9.971.540,00	9.902.326,00	69.214,00
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	2.520.000,00	2.053.500,00	466.500,00
1.1.4	5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon	2.400.000,00	2.130.713,00	269.287,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	5.183.287,00	816.713,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.763.110,00	1.879.827,00	883.283,00
1.1.4	5.2.5.91.	Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan	12.920.231,00	12.898.214,00	22.017,00
1.1.4	5.2.5.96.	Belanja Operasional Pedukuhan	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
1.1.4	5.2.5.98.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	5.062.968,00	3.825.980,00	1.237.008,00
1.1.4	5.2.5.99.	Biaya Admin Bank	116.990,00	105.000,00	11.990,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.055.000,00	2.038.600,00	16.400,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.055.000,00	2.038.600,00	16.400,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran,	18.975.600,00	12.112.000,00	6.863.600,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.975.600,00	12.112.000,00	6.863.600,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.421.600,00	7.071.500,00	5.350.100,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	456.700,00	456.500,00	200,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makar	8.580.000,00	3.231.000,00	5.349.000,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.384.900,00	3.384.000,00	900,00
1.1.6	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.054.000,00	4.540.500,00	1.513.500,00
1.1.6	5.2.2.96.	Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan D	6.054.000,00	4.540.500,00	1.513.500,00
1.1.6	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.200.000,00	42.720.000,00	2.480.000,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	42.720.000,00	2.480.000,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	45.200.000,00	42.720.000,00	2.480.000,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makar	45.200.000,00	42.720.000,00	2.480.000,00
1.2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan	156.740.606,00	152.294.900,00	4.445.706,00
1.2.1		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	69.169.706,00	66.992.400,00	2.177.306,00
1.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.500,00	53.500,00	0,00
1.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	53.500,00	53.500,00	0,00
1.2.1	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	53.500,00	53.500,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	69.116.206,00	66.938.900,00	2.177.306,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	67.788.006,00	65.638.900,00	2.149.106,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	48.959.206,00	47.173.400,00	1.785.806,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.785.500,00	16.785.500,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori	2.043.300,00	1.680.000,00	363.300,00
1.2.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.328.200,00	1.300.000,00	28.200,00
1.2.1	5.3.9.91.	Belanja Modal Lainnya	1.328.200,00	1.300.000,00	28.200,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	87.570.900,00	85.302.500,00	2.268.400,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.570.900,00	85.302.500,00	2.268.400,00
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.855.300,00	7.992.000,00	1.863.300,00
1.2.2	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	139.400,00	139.400,00	0,00
1.2.2	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	3.962.100,00	3.962.000,00	100,00
1.2.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/P	1.488.600,00	1.488.600,00	0,00
1.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	2.707.500,00	868.000,00	1.839.500,00
1.2.2	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	141.400,00	118.000,00	23.400,00
1.2.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	857.800,00	857.500,00	300,00
1.2.2	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	208.500,00	208.500,00	0,00
1.2.2	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	350.000,00	350.000,00	0,00
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	51.964.000,00	51.959.000,00	5.000,00
1.2.2	5.2.2.98.	Belanja Upah Tenaga Kerja	4.800.000,00	4.795.000,00	5.000,00
1.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	47.164.000,00	47.164.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	25.751.600,00	25.351.500,00	400.100,00
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	5.651.600,00	5.651.500,00	100,00
1.2.2	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.91.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2.100.000,00	1.700.000,00	400.000,00
1.3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan.	120.322.937,00	118.175.300,00	2.147.637,00
1.3.1		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP	116.518.537,00	114.888.400,00	1.630.137,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.546.037,00	41.875.400,00	670.637,00
1.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.964.037,00	18.293.400,00	670.637,00
1.3.1	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	5.931.137,00	5.920.850,00	10.287,00
1.3.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/P	1.925.900,00	1.924.850,00	1.050,00
1.3.1	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	4.437.000,00	4.179.700,00	257.300,00
1.3.1	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	4.950.000,00	4.908.000,00	42.000,00
1.3.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	720.000,00	360.000,00	360.000,00
1.3.1	5.2.1.10.	Belanja Obat-obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.582.000,00	23.582.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	23.582.000,00	23.582.000,00	0,00
1.3.1	5.3.	Belanja Modal	73.972.500,00	73.013.000,00	959.500,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	58.644.725,00	57.689.500,00	955.225,00
1.3.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	51.895.625,00	50.951.500,00	944.125,00
1.3.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesor	4.621.400,00	4.613.000,00	8.400,00
1.3.1	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan	2.127.700,00	2.125.000,00	2.700,00
1.3.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.327.775,00	15.323.500,00	4.275,00
1.3.1	5.3.9.91.	Belanja Modal Lainnya	15.327.775,00	15.323.500,00	4.275,00
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) ^{***}	2.728.100,00	2.524.000,00	204.100,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.728.100,00	2.524.000,00	204.100,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.728.100,00	1.524.000,00	204.100,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	1.074.100,00	933.000,00	141.100,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	654.000,00	591.000,00	63.000,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.3		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.076.300,00	762.900,00	313.400,00
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.076.300,00	762.900,00	313.400,00
1.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.076.300,00	762.900,00	313.400,00
1.3.3	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	574.900,00	574.900,00	0,00
1.3.3	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	501.400,00	188.000,00	313.400,00
1.4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	181.510.523,00	146.346.250,00	35.164.273,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes)	12.258.700,00	10.732.100,00	1.526.600,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.258.700,00	10.732.100,00	1.526.600,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.358.700,00	4.482.100,00	876.600,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	399.300,00	0,00	399.300,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	821.400,00	432.100,00	389.300,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan	4.030.000,00	3.955.000,00	75.000,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	108.000,00	95.000,00	13.000,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.900.000,00	6.250.000,00	650.000,00
1.4.1	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pem	4.500.000,00	3.850.000,00	650.000,00
1.4.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang	26.498.863,00	16.609.000,00	9.889.863,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.498.863,00	16.609.000,00	9.889.863,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.498.863,00	16.609.000,00	9.889.863,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	157.608,00	0,00	157.608,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	273.255,00	25.000,00	248.255,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan	25.420.000,00	16.284.000,00	9.136.000,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	648.000,00	300.000,00	348.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	10.224.100,00	9.373.600,00	850.500,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.224.100,00	9.373.600,00	850.500,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.234.100,00	2.938.800,00	295.500,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	492.000,00	482.500,00	9.500,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	432.100,00	432.100,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	2.310.000,00	2.024.000,00	286.000,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.990.000,00	6.435.000,00	555.000,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksana	6.990.000,00	6.435.000,00	555.000,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan	26.976.300,00	20.653.900,00	6.322.400,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.976.300,00	20.653.900,00	6.322.400,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.346.300,00	14.023.900,00	6.322.400,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	3.614.300,00	3.613.000,00	1.300,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	1.307.000,00	1.295.900,00	11.100,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	15.425.000,00	9.115.000,00	6.310.000,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksana	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
1.4.5		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.862.400,00	5.692.250,00	170.150,00
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.862.400,00	5.692.250,00	170.150,00
1.4.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.262.400,00	2.092.250,00	170.150,00
1.4.5	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	698.200,00	698.000,00	200,00
1.4.5	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	664.200,00	494.250,00	169.950,00
1.4.5	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	900.000,00	900.000,00	0,00
1.4.5	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.5	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.6		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana	8.347.000,00	2.167.000,00	6.180.000,00
1.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.347.000,00	2.167.000,00	6.180.000,00
1.4.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.347.000,00	2.167.000,00	6.180.000,00
1.4.6	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	845.000,00	845.000,00	0,00
1.4.6	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	1.562.000,00	998.000,00	564.000,00
1.4.6	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	5.940.000,00	324.000,00	5.616.000,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8.661.700,00	6.429.400,00	2.232.300,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.661.700,00	6.429.400,00	2.232.300,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.661.700,00	6.429.400,00	2.232.300,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	933.500,00	933.500,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	1.698.200,00	722.900,00	975.300,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	4.950.000,00	4.773.000,00	177.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.7	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	52.691.000,00	45.802.000,00	6.889.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.703.500,00	28.814.500,00	6.889.000,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	948.000,00	915.000,00	33.000,00
1.4.8	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	840.000,00	825.000,00	15.000,00
1.4.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	108.000,00	90.000,00	18.000,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.660.000,00	18.804.000,00	6.856.000,00
1.4.8	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pem	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	22.460.000,00	15.604.000,00	6.856.000,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.095.500,00	9.095.500,00	0,00
1.4.8	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	55.500,00	55.500,00	0,00
1.4.8	5.2.5.98.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	16.987.500,00	16.987.500,00	0,00
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	16.987.500,00	16.987.500,00	0,00
1.4.8	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	16.987.500,00	16.987.500,00	0,00
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	29.190.460,00	28.087.000,00	1.103.460,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.190.460,00	28.087.000,00	1.103.460,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.946.460,00	10.843.000,00	1.103.460,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	707.960,00	707.500,00	460,00
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Pengandaan - Bel	493.500,00	493.500,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	10.205.000,00	9.277.000,00	928.000,00
1.4.10	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	540.000,00	365.000,00	175.000,00
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksana	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
1.4.10	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa Pakaian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.194.000,00	10.194.000,00	0,00
1.4.10	5.2.5.98.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	10.194.000,00	10.194.000,00	0,00
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	800.000,00	800.000,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	49.042.123,00	3.322.600,00	45.719.523,00
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	38.895.500,00	2.422.600,00	36.472.900,00
1.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.895.500,00	2.422.600,00	36.472.900,00
1.5.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	895.500,00	881.000,00	14.500,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.5.1	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	160.500,00	150.000,00	10.500,00
1.5.1	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan	735.000,00	731.000,00	4.000,00
1.5.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	1.541.600,00	1.458.400,00
1.5.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.000.000,00	1.541.600,00	1.458.400,00
1.5.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.5.1	5.2.5.90.	Belanja Jasa Sertifikasi Tanah	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.5.2		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	7.949.623,00	0,00	7.949.623,00
1.5.2	5.3.	Belanja Modal	7.949.623,00	0,00	7.949.623,00
1.5.2	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7.949.623,00	0,00	7.949.623,00
1.5.2	5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	7.949.623,00	0,00	7.949.623,00
1.5.4		Mediasi Konflik Pertanahan	2.197.000,00	900.000,00	1.297.000,00
1.5.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.197.000,00	900.000,00	1.297.000,00
1.5.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.197.000,00	300.000,00	897.000,00
1.5.4	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	107.000,00	100.000,00	7.000,00
1.5.4	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan	1.090.000,00	200.000,00	890.000,00
1.5.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
1.5.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.159.283.470,00	1.056.931.865,00	102.351.605,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	502.709.870,00	441.943.665,00	60.766.205,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	218.623.700,00	210.273.300,00	8.350.400,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.623.700,00	210.273.300,00	8.350.400,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.995.900,00	8.742.100,00	253.800,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	280.200,00	157.100,00	123.100,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Pengandaan - Beli	607.700,00	565.000,00	42.700,00
2.1.1	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan	7.820.000,00	7.732.000,00	88.000,00
2.1.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	288.000,00	288.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	181.200.000,00	181.000.000,00	200.000,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	600.000,00	400.000,00	200.000,00
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	180.600.000,00	180.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00
2.1.1	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa Pakai	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00
2.1.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	21.287.800,00	13.391.200,00	7.896.600,00
2.1.1	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Pe	0,00	0,00	0,00
2.1.1	5.2.7.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepac	21.287.800,00	13.391.200,00	7.896.600,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	245.496.470,00	194.544.170,00	50.952.300,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	245.496.470,00	194.544.170,00	50.952.300,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	245.496.470,00	194.544.170,00	50.952.300,00
2.1.6	5.3.4.01.	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Ke	4.935.000,00	4.935.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	75.725.000,00	57.395.000,00	18.330.000,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Bahan Baku	161.912.870,00	129.998.170,00	31.914.700,00
2.1.6	5.3.4.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	2.923.600,00	2.216.000,00	707.600,00
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga	38.589.700,00	37.126.195,00	1.463.505,00
2.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.089.700,00	36.626.195,00	1.463.505,00
2.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.021.700,00	6.766.195,00	255.505,00
2.1.8	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	1.863.400,00	1.859.500,00	3.900,00
2.1.8	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	536.000,00	531.600,00	4.400,00
2.1.8	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/P	292.300,00	288.595,00	3.705,00
2.1.8	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.8	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	400.000,00	397.500,00	2.500,00
2.1.8	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	3.500.000,00	3.334.000,00	166.000,00
2.1.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	180.000,00	105.000,00	75.000,00
2.1.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.432.000,00	24.432.000,00	0,00
2.1.8	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	850.000,00	850.000,00	0,00
2.1.8	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	23.582.000,00	23.582.000,00	0,00
2.1.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	2.418.000,00	1.182.000,00
2.1.8	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	2.418.000,00	1.182.000,00
2.1.8	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.036.000,00	3.010.000,00	26.000,00
2.1.8	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.036.000,00	3.010.000,00	26.000,00
2.1.8	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.8	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.8	5.3.9.01.	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustak	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	312.204.200,00	271.714.200,00	40.490.000,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,	227.844.700,00	196.935.700,00	30.909.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.844.700,00	196.935.700,00	30.909.000,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	115.259.700,00	84.350.700,00	30.909.000,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	1.177.300,00	777.400,00	399.900,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	4.596.400,00	2.083.800,00	2.512.600,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	108.540.000,00	80.802.500,00	27.737.500,00
2.2.2	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	946.000,00	687.000,00	259.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	112.585.000,00	112.585.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanaka	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	475.000,00	475.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	101.700.000,00	101.700.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader	11.897.300,00	10.700.000,00	1.197.300,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.897.300,00	10.700.000,00	1.197.300,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.097.300,00	9.500.000,00	597.300,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	97.300,00	0,00	97.300,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makanu	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultaru	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	72.462.200,00	64.078.500,00	8.383.700,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.462.200,00	64.078.500,00	8.383.700,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	46.484.200,00	38.508.000,00	7.976.200,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	545.700,00	545.000,00	700,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Bel	173.500,00	0,00	173.500,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makanu	45.765.000,00	37.963.000,00	7.802.000,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.950.000,00	12.562.500,00	387.500,00
2.2.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultaru	2.850.000,00	2.462.500,00	387.500,00
2.2.4	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pem	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	10.628.000,00	10.608.000,00	20.000,00
2.2.4	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ Ikan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepac	2.708.000,00	2.688.000,00	20.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.160.200,00	143.785.000,00	375.200,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	18.726.400,00	18.521.600,00	204.800,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	18.726.400,00	18.521.600,00	204.800,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	18.726.400,00	18.521.600,00	204.800,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Ke	0,00	0,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Bahan Baku	7.979.200,00	7.877.850,00	101.350,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Sewa Peralatan	200.000,00	200.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	737.200,00	633.750,00	103.450,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **	70.606.000,00	70.606.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	70.606.000,00	70.606.000,00	0,00
2.3.12	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
2.3.12	5.3.4.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	70.606.000,00	70.606.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Ke	660.000,00	660.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Bahan Baku	54.616.000,00	54.616.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Sewa Peralatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	550.000,00	550.000,00	0,00
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jembatan Millik Desa **	0,00	0,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
2.3.13	5.3.6.01.	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Ke	0,00	0,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
2.3.13	5.3.6.04.	Belanja Modal Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.3.13	5.3.6.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan	54.827.800,00	54.657.400,00	170.400,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	54.827.800,00	54.657.400,00	170.400,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	54.827.800,00	54.657.400,00	170.400,00
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Ke	660.000,00	660.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	13.930.000,00	13.930.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Bahan Baku	40.087.800,00	39.917.400,00	170.400,00
2.3.14	5.3.5.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4		<u>Sub Bidang Kawasan Permukiman</u>	<u>195.000.000,00</u>	<u>195.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.4.1		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke r	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
2.4.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.4.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
2.4.1	5.3.4.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.4.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
2.6		<u>Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan</u>	<u>2.664.200,00</u>	<u>2.084.000,00</u>	<u>580.200,00</u>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi	2.664.200,00	2.084.000,00	580.200,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.664.200,00	2.084.000,00	580.200,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.664.200,00	2.084.000,00	580.200,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.664.200,00	2.084.000,00	580.200,00
2.8		<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	<u>2.545.000,00</u>	<u>2.405.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
2.8.3		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.545.000,00	2.405.000,00	140.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.8.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.545.000,00	2.405.000,00	140.000,00
2.8.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	740.000,00	740.000,00	0,00
2.8.3	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan	740.000,00	740.000,00	0,00
2.8.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.805.000,00	1.665.000,00	140.000,00
2.8.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultar	825.000,00	825.000,00	0,00
2.8.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	980.000,00	840.000,00	140.000,00
2.8.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	0,00	0,00	0,00
2.8.3	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Pe	0,00	0,00	0,00
3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	322.991.375,00	239.476.800,00	83.514.775,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan	108.329.100,00	82.030.700,00	26.298.400,00
3.1.2		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	77.563.200,00	59.393.750,00	18.169.450,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.563.200,00	59.393.750,00	18.169.450,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.615.700,00	3.576.250,00	39.450,00
3.1.2	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	335.700,00	335.000,00	700,00
3.1.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	1.370.000,00	1.366.250,00	3.750,00
3.1.2	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belk	160.000,00	125.000,00	35.000,00
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	22.110.000,00	21.980.000,00	130.000,00
3.1.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksana	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.98.	Belanja Upah Tenaga Kerja	13.200.000,00	13.070.000,00	130.000,00
3.1.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	51.837.500,00	33.837.500,00	18.000.000,00
3.1.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke	33.837.500,00	33.837.500,00	0,00
3.1.2	5.2.7.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepac	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
3.1.5		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	12.734.300,00	12.063.450,00	670.850,00
3.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.734.300,00	12.063.450,00	670.850,00
3.1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.975.800,00	5.453.750,00	522.050,00
3.1.5	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	0,00	0,00	0,00
3.1.5	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	1.740.800,00	1.738.750,00	2.050,00
3.1.5	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan	4.235.000,00	3.715.000,00	520.000,00
3.1.5	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.810.500,00	1.772.000,00	38.500,00
3.1.5	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.810.500,00	1.772.000,00	38.500,00
3.1.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	4.948.000,00	4.837.700,00	110.300,00
3.1.5	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke	1.768.000,00	1.657.700,00	110.300,00
3.1.5	5.2.7.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepac	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan	18.031.600,00	10.573.500,00	7.458.100,00
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.031.600,00	10.573.500,00	7.458.100,00
3.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.206.600,00	9.398.500,00	2.808.100,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.1.7	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	761.600,00	737.000,00	24.600,00
3.1.7	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	685.000,00	0,00	685.000,00
3.1.7	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	200.000,00	128.500,00	71.500,00
3.1.7	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	10.560.000,00	8.533.000,00	2.027.000,00
3.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.825.000,00	1.175.000,00	4.650.000,00
3.1.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	3.825.000,00	275.000,00	3.550.000,00
3.1.7	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pem	2.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	141.251.975,00	92.848.500,00	48.403.475,00
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	85.619.543,00	58.856.700,00	26.762.843,00
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.619.543,00	58.856.700,00	26.762.843,00
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	46.254.543,00	23.246.700,00	23.007.843,00
3.2.1	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	665.600,00	240.000,00	425.600,00
3.2.1	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	174.900,00	174.900,00	0,00
3.2.1	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	271.600,00	130.900,00	140.700,00
3.2.1	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	22.650.000,00	8.262.000,00	14.388.000,00
3.2.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.492.143,00	1.027.500,00	464.643,00
3.2.1	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	21.000.300,00	13.411.400,00	7.588.900,00
3.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.425.000,00	14.800.000,00	625.000,00
3.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	3.125.000,00	2.500.000,00	625.000,00
3.2.1	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.2.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.2.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.040.000,00	2.450.000,00	2.590.000,00
3.2.1	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	890.000,00	0,00	890.000,00
3.2.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	4.150.000,00	2.450.000,00	1.700.000,00
3.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep:	18.900.000,00	18.360.000,00	540.000,00
3.2.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke	18.900.000,00	18.360.000,00	540.000,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan)	55.632.432,00	33.991.800,00	21.640.632,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.632.432,00	33.991.800,00	21.640.632,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.091.932,00	11.901.800,00	6.190.132,00
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	97.300,00	97.300,00	0,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Bel	192.100,00	89.500,00	102.600,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	16.562.700,00	10.880.000,00	5.682.700,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	465.832,00	385.000,00	80.832,00
3.2.3	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	774.000,00	450.000,00	324.000,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.580.000,00	220.000,00
3.2.3	5.2.2.98.	Belanja Upah Tenaga Kerja	1.800.000,00	1.580.000,00	220.000,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	20.740.500,00	8.900.000,00	11.840.500,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	19.880.500,00	8.900.000,00	10.980.500,00
3.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	860.000,00	0,00	860.000,00
3.2.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.000.000,00	11.610.000,00	3.390.000,00
3.2.3	5.2.5.98.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	15.000.000,00	11.610.000,00	3.390.000,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</u>	<u>51.637.000,00</u>	<u>49.832.900,00</u>	<u>1.704.100,00</u>
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	39.197.300,00	39.152.900,00	44.400,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.197.300,00	39.152.900,00	44.400,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.027.300,00	14.994.900,00	32.400,00
3.3.3	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	528.900,00	528.900,00	0,00
3.3.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	4.123.400,00	4.108.000,00	15.400,00
3.3.3	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Beli	254.000,00	254.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	6.015.000,00	6.000.000,00	15.000,00
3.3.3	5.2.1.10.	Belanja Obat-obatan	65.600,00	65.600,00	0,00
3.3.3	5.2.1.90.	Belanja Papan Informasi Kegiatan	540.000,00	540.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	3.502.400,00	3.500.400,00	2.000,00
3.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.300.000,00	6.288.000,00	12.000,00
3.3.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.300.000,00	6.288.000,00	12.000,00
3.3.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00
3.3.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	8.380.000,00	8.380.000,00	0,00
3.3.3	5.2.7.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepac	8.380.000,00	8.380.000,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	12.339.700,00	10.680.000,00	1.659.700,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.339.700,00	10.680.000,00	1.659.700,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.339.700,00	10.680.000,00	1.659.700,00
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	137.600,00	0,00	137.600,00
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Beli	52.100,00	0,00	52.100,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	12.150.000,00	10.680.000,00	1.470.000,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>21.873.300,00</u>	<u>14.784.500,00</u>	<u>7.108.800,00</u>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.181.600,00	5.940.000,00	2.241.600,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.181.600,00	5.940.000,00	2.241.600,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.181.600,00	5.940.000,00	2.241.600,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	158.800,00	0,00	158.800,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Beli	122.800,00	0,00	122.800,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	7.900.000,00	5.940.000,00	1.960.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	9.226.700,00	8.229.500,00	997.200,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.226.700,00	8.229.500,00	997.200,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.226.700,00	8.229.500,00	997.200,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	479.700,00	479.500,00	200,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Bek	507.000,00	0,00	507.000,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	8.240.000,00	7.750.000,00	490.000,00
3.4.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	0,00	0,00	0,00
3.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	0,00	0,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.465.000,00	595.000,00	3.870.000,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.465.000,00	595.000,00	3.870.000,00
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.465.000,00	595.000,00	3.870.000,00
3.4.4	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benc	287.000,00	0,00	287.000,00
3.4.4	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Bek	53.000,00	0,00	53.000,00
3.4.4	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	4.125.000,00	595.000,00	3.530.000,00
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	900.419.200,00	896.100.995,00	4.318.205,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	890.925.100,00	888.603.395,00	2.321.705,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,	25.152.100,00	24.885.000,00	267.100,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.152.100,00	24.885.000,00	267.100,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.375.000,00	3.130.000,00	245.000,00
4.2.1	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	3.375.000,00	3.130.000,00	245.000,00
4.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.730.000,00	9.730.000,00	0,00
4.2.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksana	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
4.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.2.1	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	12.047.100,00	12.025.000,00	22.100,00
4.2.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ Ikan	3.404.500,00	3.393.000,00	11.500,00
4.2.1	5.2.7.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepac	8.642.600,00	8.632.000,00	10.600,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan	57.523.000,00	55.695.440,00	1.827.560,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.523.000,00	55.695.440,00	1.827.560,00
4.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	57.523.000,00	55.695.440,00	1.827.560,00
4.2.2	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ Ikan	55.876.000,00	54.048.440,00	1.827.560,00
4.2.2	5.2.7.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepac	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (Kesiapan	808.250.000,00	808.022.955,00	227.045,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ Ikan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
4.2.3	5.3.	Belanja Modal	802.000.000,00	801.772.955,00	227.045,00
4.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	802.000.000,00	801.772.955,00	227.045,00
4.2.3	5.3.4.01.	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Ke	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	191.195.000,00	191.035.000,00	160.000,00
4.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Bahan Baku	532.975.800,00	532.922.955,00	52.845,00
4.2.3	5.3.4.04.	Belanja Modal Sewa Peralatan	77.140.000,00	77.140.000,00	0,00
4.2.3	5.3.4.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	689.200,00	675.000,00	14.200,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	1.771.500,00	0,00	1.771.500,00
4.4.3		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	1.771.500,00	0,00	1.771.500,00
4.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.771.500,00	0,00	1.771.500,00
4.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.771.500,00	0,00	1.771.500,00
4.4.3	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	616.500,00	0,00	616.500,00
4.4.3	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.035.000,00	2.810.000,00	225.000,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	3.035.000,00	2.810.000,00	225.000,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	2.810.000,00	225.000,00
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.210.000,00	1.185.000,00	25.000,00
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	1.210.000,00	1.185.000,00	25.000,00
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.825.000,00	1.625.000,00	200.000,00
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	825.000,00	825.000,00	0,00
4.6.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.687.600,00	4.687.600,00	0,00
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin	4.687.600,00	4.687.600,00	0,00
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.687.600,00	4.687.600,00	0,00
4.7.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.587.600,00	2.587.600,00	0,00
4.7.4	5.2.1.06.	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/	555.000,00	555.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan/Material	2.032.600,00	2.032.600,00	0,00
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Me	152.734.900,00	133.200.000,00	19.534.900,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	19.534.900,00	0,00	19.534.900,00
5.2.0		Keadaan Darurat	19.534.900,00	0,00	19.534.900,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.534.900,00	0,00	19.534.900,00
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	19.534.900,00	0,00	19.534.900,00
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tak Terduga	19.534.900,00	0,00	19.534.900,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00
5.3.0		Keadaan Mendesak	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tak Terduga	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			4.252.189.549,00	3.930.586.979,00	321.602.570,00
SURPLUS / (DEFISIT)			86.133.209,00	363.461.532,95	(267.328.323,95)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	218.366.791,00	218.366.791,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	210.417.168,00	210.417.168,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	210.417.168,00	210.417.168,00	0,00
6.1.3.		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	7.949.623,00	7.949.623,00	0,00
6.1.3.01.		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	7.949.623,00	7.949.623,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	304.500.000,00	310.050.105,00	(5.550.105,00)
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	304.500.000,00	304.500.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	304.500.000,00	304.500.000,00	0,00
6.2.3.		Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	5.550.105,00	(5.550.105,00)
6.2.3.91.		Dana Keistimewaan	0,00	5.550.105,00	(5.550.105,00)
JUMLAH PEMBIAYAAN			(86.133.209,00)	(91.683.314,00)	6.650.105,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	261.778.218,95	(261.778.218,95)

HARGOREJO, 31 Desember 2025

LURAH HARGOREJO

BHEKTI MURDAYANTO, S.E



LAMPIRAN IV
LAPORAN PROGRAM SEKTORAL,
PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE KALURAHAN

**PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE KALURAHAN TAHUN 2025**

KALURAHAN : HARGOREJO
 KAPANEWON : KOKAP
 KABUPATEN : KULON PROGO
 PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	PROGRAM	KEGIATAN				ANGGARAN		SWADAYA MASYARAKAT
		JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi Jalan Lokap Primer (JLP) Ruas Kokap-Kalirelo	Gunung Kukusan	300	meter	662,500,000	APBD 2	
		Talud dan Bronjong Jalan Propinsi Teglasari-Klepu	Gunung Rego	30	Meter	39,000,000	APBD 1	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Padat karya Infrastruktur	Penggung	264	meter	100,000,000	APBN	14,900,000
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM)	Sangkrek	50	SR	100,000,000.00	APBD 2	5,000,000
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Pengerukan Drainase Kriyan)	Kriyan	150	Meter	24,000,000	APBD 2	1,200,000
		Bronjong Pengaman Sungai	Pandu	15	meter	7,500,000	APBD 2	
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masvarakat	Bantuan Sosial Jamban Sehat	Gunung Kukusan, Penggung, Selo Timur, Anjir, Kriyan, Gunung Rego	9	Unit	22,500,000	APBD 2	18,000,000
		Bantuan Toolkid Posyandu	Pandu	1	Paket	20,000,000	BKKBN	
6	Program Kawasan Permukiman	Bantuan Sosial RTLH	an. Bapak Eko Suparjianto, Gunung Rego	1	Unit	20,000,000	BAZNAS	20,000,000
		Bantuan Sosial RTLH	an. Bapak Suharno: Krenqseng	1	Unit	20,000,000	CSR BPD DIY	
		Bantuan Sosial RTLH	Kliripan, Gunung Rego, Selo Timur	3	Unit	75,000,000	APBD 2	60,000,000
		Bantuan Sosial RTLH	an. Bapak Yunianto: Kriyan	1	Unit	20,000,000	APBD 2	7,000,000
		Bantuan Sosial Rehab Rumah ALADIN (Atap, Lantai, Dinding)	an.Bapak Sukirman, Bapak Triyanto, Ibu Satinem; Kriyan	3	Paket	15,000,000	BAZNAS	6,000,000
7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penanaman Pohon di Daerah Tangkapan sekitar mata Air dan sempadan sungai	KTH Wonoardi Sambeng. KTH Wonodadi Pandu, KTH Luwes Anjir, KTH Taruna Tani Selo Timur	480	Pohon	57,600,000	APBD 2	2,000,000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN				ANGGARAN		SWADAYA MASYARAKAT
		JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk	KUB Golden Nira Lestari Ngaseman; KWT Ngudi Rejeki Kriyan; KWT Melati Gunung Rego; KWT Gayatri Sangkrek; KWT Melati Ngulakan	8490	Kg	21,225,000	APBD 2	
		Bantuan pengembangan Kawasan Kelapa Genjah Khusus (Pandan wanai)	Hargorejo	2500	Pohon	375,000,000	APBN	
		Bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian): pompa dan power cruiser	KT Maju Kriyan dan KT Aneka Karya Ngulakan	2	unit	20,000,000	APBD 2	
		Bantuan Benih jagung	KTH Wonodadi Pandu, KTH Taruna Tani Selo Timur	40	Kg	6,000,000	POLRI	
		Program Pangan Bergizi (PPB)	KWT Gayatri Sangkrek	1	Paket	12,000,000	APBD 2	
9	Program Pengembangan Tempat Ibadah	Kalibrasi Arah Kiblat	Pandu	1	Paket		APBD 2	
		Pengembangan sarpras Masjid	Masjid Jannatunaim Selo Timur	1	Paket	9,796,000	CSR	
10	Bantuan Sosial (Bansos)	Program Keluarga Harapan (PKH)	Hargorejo	694	jiwa	8,328,000,000	APBN	
		Bantuan Sembako	Hargorejo	1099	KK	2,637,600,000	APBN	
		Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Hargorejo	109	KK	261,600,000	APBD 2	
		BLTS Kesra	Hargorejo	716	KK	644,400,000	APBN	
		Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)	Hargorejo	15	jiwa	54,000,000	APBD 1	
		Bantuan Lansia	Hargorejo	20	Paket	10,000,000	APBD 2	
		Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (Jamsos PBI)	Hargorejo	2233	jiwa		APBD 2	
		Bantuan Pangan Beras	Hargorejo	1,444	jiwa	679,860,000	APBN	
11	Program Pengabdian Masyarakat (PPM)	Dokumentasi Mantan Dukung, Digitalisasi Peta Padukuhan	Anjir	4 Foto 2 Peta	buah	5,000,000	KKN UGM	
		Papan nama Balai Padukuhan dan Pembuatan pintu induk mata air Mudal	Anjir	2	Paket	10,000,000	KKN UIN	
		Restocking Ikan di Sungai Mudal	Anjir	600	ekor	1,200,000	KKN UGM	
		Pengembangan Yayasan Ar Rohman	Krengseng	1	Paket	150,000,000	Donatur	6,000,000

No.	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN		SWADAYA MASYARAKAT	
		JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)		SUMBER DANA
		Pelatihan dan pengembangan batik Ecoprint	Ngulakan	70	Pcs	5,000,000	KKN UMY	
		Program Pemanfaatan Limbah	Ngulakan	1	Paket	5,000,000	KKN UMY	
12	Program Swadaya Masyarakat	Pembukaan jalan tembus	RT 085-091 Anjir	1200	meter		Swadaya Masyarakat	7,000,000
		Pengecoran Isi tengah	RT 098/028 Krengseng	1	Ruas		Swadaya Masyarakat	4,360,000
		Gorong-gorong	RT 100/027 Krengseng	1	Unit		Swadaya Masyarakat	2,500,000
		Rehabilitasi Gorong-gorong Ruas Jalan Pandu-Sambeng	RT 039/010 Tejogan	3	meter		Swadaya Masyarakat	6,000,000
		Pembangunan corblok ful beton	RT 040/011 Tejogan	6.25	M3		Swadaya Masyarakat	20,000,000
		Rekonstruksi Jalan Lingkungan	RT 084 & 080/023 Pandu	300	meter		Swadaya Masyarakat	7,000,000
		LPJU Jalan Lingkungan	RT 011-015, RT 020/004 Gunung Rego	16	Unit		Swadaya Masyarakat	4,300,000
		Pembangunan Dapur dan Gudang Masjid Al-Jihad	RT 010/005 Gunung Rego	3x9	meter		Swadaya Masyarakat	45,000,000
		Pembangunan corblok	RT 020/005 Gunung Rego	30	meter		Swadaya Masyarakat	3,000,000
		Pembangunan talud pencahman jalan	RT 021/006 Ngaseman				Swadaya Masyarakat	10,000,000
		Pembangunan jalan dan pemeliharaan Jaringan air	RT 07-08 Gunung Kukusan	100	meter		Swadaya Masyarakat	12,000,000
		Pembangunan Gorong-gorong dan perbaikan drainase	RT 051/015 Sangkrek	1	Paket		Swadaya Masyarakat	5,700,000
		LPJU Jalan Lingkungan	RT 51-49 Sangkrek	15	bh		Swadaya Masyarakat	3,750,000
		Restrukturisasi Jalan Desa	RT 49-50 Sangkrek	50	meter		Swadaya Masyarakat	9,000,000
		Restrukturisasi Jalan Lingkungan	RT 111 Ngulakan	30	meter		Swadaya Masyarakat	15,000,000
13	Program Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Sangkrek	59.09	M3	70,606,000	APBN	18,000,000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN				ANGGARAN		SWADAYA MASYARAKAT
		JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Sambeng	8.58	M3	18,521,600	APBN	2,500,000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana Jalan desa (Talud)	Sambeng	65.31	M3	54,657,400	APBN	2,500,000
		Pembangunan Gedung PAUD	Ngaseman	54	M2	194,544,170	APBN	25,000,000
JUMLAH						14,757,110,170		342,710,000



Hargorejo, 31 Desember 2025
LURAH HARGOREJO,

[Handwritten Signature]
BHEKTI MURDAYANTO, S.E.